

Respon Masyarakat di Desa Mopolo Esa dengan Menjaga Keterlibatan Pesta Demokrasi Tahun 2024

Daniel Manikome¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: 120606032@unima.ac.id, 2romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 14, 2025
 Accepted March 25, 2025
 Published May 30, 2025

Kata Kunci:

Partisipasi Politik,
 Integritas Pemilu,
 Respon Masyarakat,
 Demokrasi Desa,
 Pemilu 2024



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga keterlibatan mereka pada Pemilu 2024, khususnya terkait dengan upaya menjaga ketertiban, menolak politik uang, dan mempertahankan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam terhadap perangkat desa dan masyarakat untuk memperoleh data primer tentang dinamika partisipasi politik di tingkat desa. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki respon positif dan matang dalam menjaga keterlibatan pemilu yang tercermin dari ketertiban yang terjaga dengan baik tanpa kerusuhan, sikap tegas menolak politik uang dengan kesediaan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu, dan partisipasi aktif dalam berbagai tahapan pemilu yang didorong oleh kesadaran politik yang tinggi dan literasi politik yang baik. Keberhasilan menjaga keterlibatan pemilu didukung oleh peran kepemimpinan lokal yang demokratis, norma sosial yang kuat menolak praktik yang merusak integritas pemilu, dan modal sosial berupa solidaritas dan jaringan sosial yang efektif dalam memfasilitasi partisipasi kolektif.

Abstract

This study aims to analyze the response of the Mopolo Esa Village community in maintaining their involvement in the 2024 Election, specifically related to efforts to maintain order, reject money politics, and maintain active participation in the democratic process. The study used a qualitative approach with observation methods and in-depth interviews with village officials and the community to obtain primary data on the dynamics of political participation at the village level. Data analysis used the Miles and Huberman model with data triangulation to ensure the validity of the findings. The results show that the Mopolo Esa Village community has a positive and mature response in maintaining election involvement, reflected in well-maintained order without riots, a firm stance against money politics with a willingness to report violations to the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and active participation in various stages of the election driven by high political awareness and good political literacy. The success of maintaining election involvement is supported by the role of democratic local leadership, strong social norms rejecting practices that undermine election integrity, and social capital in the form of solidarity and effective social networks in facilitating collective participation.

Keywords: Political Participation, Election Integrity, Public Response, Village Democracy, 2024 Election

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan demokrasi yang menjadi sarana fundamental bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan

pemerintahan (Wardhani, 2019). Partisipasi politik dalam negara demokrasi menjadi indikator penting implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat, yang dimanifestasikan melalui keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Pemilu 2024 di Indonesia mencatat tingkat partisipasi pemilih secara nasional mencapai 81,78 persen, meskipun angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mencapai 81,97 persen (KPU, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan, antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi masih relatif tinggi, namun perlu dikaji lebih mendalam terutama pada tingkat desa yang memiliki karakteristik sosial politik yang khas.

Konteks perdesaan memiliki dinamika partisipasi politik yang berbeda dengan wilayah perkotaan, dimana faktor struktur sosial, kepentingan kandidat, dan pengenalan terhadap calon pemimpin menjadi determinan signifikan dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat (Miaz, 2012). Masyarakat desa di Indonesia yang berjumlah sekitar 119,7 juta jiwa atau 44,23 persen dari total penduduk Indonesia tersebar di 74.961 desa menunjukkan bahwa partisipasi politik di tingkat desa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi nasional (Kemendagri, 2021). Struktur sosial masyarakat di tingkat pedesaan, termasuk sistem kekerabatan, tokoh masyarakat, dan nilai-nilai lokal yang masih kuat, turut menentukan pola partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Desa Mopolo Esa sebagai salah satu desa di Indonesia memiliki karakteristik unik dalam respon masyarakatnya terhadap penyelenggaraan pemilu, dimana keterlibatan masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga dari kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengawal proses demokrasi.

Realitas pelaksanaan Pemilu 2024 di tingkat desa menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, mulai dari efektivitas sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum, tingkat pendidikan politik masyarakat, hingga peran kepemimpinan lokal dalam memobilisasi partisipasi (Pagar Alam, 2024). Strategi komunikasi politik pemerintahan daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan menjadi aspek krusial yang perlu dikaji untuk memahami dinamika keterlibatan masyarakat desa dalam pesta demokrasi (Zainal, 2018). Fenomena kejenuhan politik, kelelahan partai politik akibat maraton pemilu, serta faktor geografis dan kompetensi penyelenggara juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penelitian tentang respon masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga keterlibatan mereka pada Pemilu 2024 menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana masyarakat desa merespon dan mempertahankan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi di tengah berbagai dinamika sosial politik yang kompleks.

Kajian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan berbagai fokus dan pendekatan. Miaz (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi" menganalisis perubahan pola partisipasi politik masyarakat Indonesia dari era Orde Baru hingga era Reformasi, dimana ditemukan bahwa partisipasi politik era Orde Baru cukup tinggi namun dinilai semu karena pemilih tidak memilih atas kemauan sendiri melainkan karena mobilisasi dan tekanan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami transformasi karakter partisipasi politik masyarakat Indonesia yang bergeser dari partisipasi mobilisasi menuju partisipasi otonom yang lebih mencerminkan kesadaran demokratis. Temuan ini relevan untuk memahami konteks partisipasi masyarakat desa pada Pemilu 2024 yang sudah berada dalam era demokrasi yang lebih matang. Wardhani (2019) dalam kajiannya tentang "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" mengidentifikasi bahwa partisipasi politik pemilih pemula dipengaruhi oleh tingkat pemahaman tentang sistem

demokrasi, akses terhadap informasi politik, dan peran pendidikan politik dalam membentuk kesadaran berdemokrasi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi politik sebagai fondasi partisipasi yang berkualitas, dimana pemilih tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Zainal (2018) melalui penelitiannya "Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan" menemukan bahwa efektivitas komunikasi politik antara pemerintah daerah dan masyarakat desa menjadi faktor determinan dalam meningkatkan partisipasi politik, dimana pendekatan komunikasi yang bersifat dialogis dan mengakomodasi nilai-nilai lokal terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan komunikasi searah yang bersifat instruktif.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijawab, khususnya terkait dengan respon masyarakat desa dalam konteks Pemilu 2024 yang memiliki karakteristik unik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi secara kuantitatif, namun belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam tentang respon kualitatif masyarakat desa dalam menjaga keterlibatan mereka sepanjang proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahap sosialisasi, kampanye, hingga hari pencoblosan dan pasca pemilu. Kesenjangan ini penting untuk diteliti karena respon masyarakat tidak hanya tercermin dari angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka dalam mengawal proses demokrasi, termasuk kesadaran untuk mencegah politik uang, menjaga keamanan TPS, dan menerima hasil pemilu secara dewasa. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak yang mengangkat studi kasus spesifik pada satu desa untuk memberikan gambaran mendalam tentang dinamika sosial politik lokal yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap pemilu. Konteks lokal ini penting karena setiap desa memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda yang dapat mempengaruhi pola respon dan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi, sehingga studi kasus pada Desa Mopolo Esa dapat memberikan insight baru tentang bagaimana faktor-faktor lokal berinteraksi dengan dinamika politik nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengeksplorasi respon masyarakat Desa Mopolo Esa secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada tingkat partisipasi pemilih tetapi juga pada kualitas keterlibatan masyarakat dalam menjaga seluruh proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana masyarakat desa merespon berbagai tahapan pemilu, termasuk kesadaran mereka dalam mengawal proses demokrasi, sikap terhadap kampanye politik, peran tokoh masyarakat dan pemuda dalam memobilisasi partisipasi, serta mekanisme sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menjaga integritas pemilu. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam studi partisipasi politik dengan tidak hanya melihat partisipasi sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan agency masyarakat dalam mengkonstruksi makna dan praktik demokrasi sesuai dengan konteks lokal mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi best practices dan pembelajaran dari Desa Mopolo Esa yang dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam menjaga keterlibatan masyarakat pada pemilu-pemilu mendatang. Dengan menggunakan perspektif bottom-up, penelitian ini akan memberikan suara kepada masyarakat desa untuk mengekspresikan persepsi, pengalaman, dan harapan mereka terkait penyelenggaraan pemilu, yang seringkali terabaikan dalam studi-studi partisipasi politik yang lebih menekankan pada perspektif top-down.

Realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki dinamika tersendiri dalam merespon Pemilu 2024, dimana terdapat fenomena menarik terkait dengan bagaimana masyarakat secara kolektif mengorganisir diri untuk terlibat aktif dalam

seluruh tahapan pemilu. Observasi awal mengindikasikan adanya kesadaran kolektif yang kuat di kalangan masyarakat desa untuk menjaga netralitas aparat desa, mencegah praktik politik uang, dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Kesadaran ini tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang panjang, pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, serta peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi yang berkualitas. Masyarakat Desa Mopolo Esa juga menunjukkan kemampuan adaptif dalam merespon dinamika politik kontemporer, termasuk dalam menyikapi penetrasi media sosial dan hoaks politik yang marak menjelang pemilu, dimana mereka mengembangkan literasi digital dan mekanisme verifikasi informasi secara komunal untuk menghindari polarisasi politik yang dapat mengancam kohesi sosial di desa. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak pasif dalam menghadapi gelombang demokratisasi, tetapi aktif sebagai agen perubahan yang mampu mengkontekstualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kerangka budaya lokal mereka, sehingga demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal tetapi sebagai praktik hidup bersama yang harus dijaga keberlanjutannya demi kemajuan dan kesejahteraan desa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam respon masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga keterlibatan mereka pada Pemilu 2024. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial, dimana peneliti membangun gambaran kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan detail dari para informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan persepsi masyarakat terkait partisipasi mereka dalam proses demokrasi, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif namun memerlukan eksplorasi naratif yang komprehensif. Penelitian dilaksanakan di Desa Mopolo Esa dengan fokus pada periode sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga dapat menangkap dinamika respon masyarakat secara longitudinal dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data primer yang kaya dan mendalam. Observasi dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung mengamati aktivitas masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga hari pencoblosan dan pasca pemilu, untuk memperoleh gambaran natural tentang perilaku dan interaksi sosial masyarakat dalam konteks demokrasi. Menurut Gill et al. (2008), observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung dalam setting alamiahnya, sehingga dapat menangkap nuansa dan dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas kepada informan dalam mengekspresikan pandangan mereka sambil tetap memastikan bahwa topik-topik penting terkait penelitian dapat tergali dengan baik, dengan pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan observasi awal dan kerangka teoretis penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data

dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari observasi dan wawancara, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar tema yang muncul, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan verifikasi data yang telah disajikan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yaitu dengan memverifikasi temuan dari observasi dengan hasil wawancara, serta membandingkan informasi dari berbagai sumber informan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh. Triangulasi ini penting untuk mengurangi bias penelitian dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian, karena data yang sama dikonfirmasi dari berbagai sudut pandang dan metode pengumpulan data yang berbeda, sehingga kesimpulan yang diambil memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Respon Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemilu

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki kesadaran kolektif yang tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya Pemilu 2024. Masyarakat menunjukkan sikap antusias namun tetap tertib dalam menggunakan hak pilih mereka, dimana tidak terjadi kerusuhan atau konflik yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi. Kondisi ini mencerminkan kematangan politik masyarakat yang memahami bahwa pemilu adalah proses demokrasi yang harus dijaga kesakralannya, bukan ajang untuk memicu perpecahan atau konflik horizontal. Ketertiban yang terjaga dengan baik ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen bersama untuk menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat yang damai dan bermartabat.

Peran perangkat desa, khususnya Kepala Desa (Pala) sangat signifikan dalam membentuk respon positif masyarakat terhadap pemilu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak GT selaku perangkat desa, beliau menjelaskan bahwa,

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak GT



Sumber: Data Primer

”...cara saya sebagai perangkat desa (Pala) dalam menjaga ketertiban dan keamanan sementara berlangsungnya demokrasi yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlalu terpengaruh atau tidak terprofokkasi dengan oknum-oknum tim sukses yang tidak

bertanggung jawab, atau berusaha mengadu domba masyarakat. Panas boleh tetapi pikiran harus tetap dingin, karna biasanya panas demokrasi itu cuma berlangsung sementara”.

Beliau menekankan bahwa meskipun persaingan politik berlangsung panas, masyarakat harus mampu mengendalikan emosi dan tidak terjebak dalam konflik. Pendekatan komunikasi persuasif ini efektif dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak boleh merusak keharmonisan sosial yang telah terbangun lama di desa.

Respon positif dari masyarakat juga terlihat dari testimoni Ibu YW yang menyatakan bahwa,

”...menurut saya demokrasi yang ada di desa Mopolo Esa itu baik, karena semua masyarakat mengambil hak suaranya sendiri dan juga masyarakat mengikuti pesta demokrasi ini dengan tertib atau tidak terjadinya keributan”.

Gambar 2. Wawancara dengan ibu YW



Sumber: Data Primer

Masyarakat memahami bahwa hak pilih adalah hak individu yang harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kesadaran ini merupakan hasil dari proses edukasi politik yang berlangsung secara kontinu di desa, baik melalui sosialisasi formal dari KPU maupun melalui diskusi-diskusi informal yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Ketertiban yang terjaga selama pemilu menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa telah mampu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam praktik kehidupan nyata, dimana perbedaan politik tidak menjadi pemicu konflik tetapi justru menjadi bagian dari dinamika sosial yang sehat.

b. Sikap Masyarakat terhadap Politik Uang dan Pelanggaran Pemilu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki sikap tegas menolak praktik politik uang yang kerap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Observasi di lapangan mengindikasikan adanya kesadaran kritis masyarakat bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang dapat merusak integritas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Masyarakat memahami bahwa menerima uang dari tim sukses kandidat tertentu akan menciptakan sistem transaksional dalam politik

yang pada akhirnya merugikan rakyat sendiri, karena pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung akan lebih fokus mengembalikan modal politik daripada melayani kepentingan rakyat. Kesadaran ini tidak muncul secara instan, tetapi merupakan hasil dari pengalaman pahit pada pemilu-pemilu sebelumnya dimana praktik politik uang justru menghasilkan pemimpin yang tidak amanah.

Sikap kritis masyarakat terhadap politik uang tercermin dari tindakan konkret yang dilakukan ketika mengetahui adanya pelanggaran. Berdasarkan wawancara dengan Bapak JW, beliau menyatakan bahwa,

”... Tindakan saya sebagai masyarakat adalah dengan mendatangi dan melaporkan pelanggaran paslon yang menggunakan politik uang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu”.

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak JW



Sumber: Data Primer

Sikap proaktif ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima atau menolak politik uang secara individual, tetapi juga berani mengambil tindakan kolektif untuk mengawal integritas pemilu. Kesiadaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran mencerminkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga pengawas pemilu dan keyakinan bahwa tindakan mereka akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak takut terhadap intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena mereka memiliki kesadaran bahwa melaporkan pelanggaran adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik.

Respon tegas masyarakat terhadap politik uang juga didukung oleh norma sosial yang berkembang di desa, dimana praktik politik uang dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran yang dianut masyarakat. Di Desa Mopolo Esa, kontrol sosial terhadap praktik-praktik yang menyimpang masih sangat kuat, sehingga siapapun yang terlibat dalam politik uang, baik sebagai pemberi maupun penerima, akan mendapat sanksi sosial berupa kehilangan kepercayaan dan harga diri di mata masyarakat. Mekanisme kontrol sosial ini efektif dalam menekan angka praktik politik uang karena masyarakat desa pada umumnya sangat menghargai reputasi dan hubungan sosial yang harmonis. Tokoh masyarakat dan pemuka agama juga berperan aktif dalam memberikan pencerahan kepada warga tentang dampak negatif politik uang, baik dari perspektif moral, agama, maupun dampak jangka panjang terhadap kualitas kepemimpinan dan pembangunan desa. Dengan demikian, sikap penolakan terhadap politik uang di Desa Mopolo Esa bukan hanya didorong oleh kesadaran

legal formal, tetapi juga oleh kesadaran moral dan nilai-nilai sosial budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

c. Partisipasi Aktif dan Kesadaran Politik Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Mopolo Esa dalam Pemilu 2024 tidak hanya terlihat dari tingkat kehadiran di TPS yang tinggi, tetapi juga dari kualitas keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan pemilu. Observasi menunjukkan bahwa masyarakat aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU dan perangkat desa, menghadiri kampanye dialogis untuk mendengarkan visi misi kandidat, serta berdiskusi secara informal dengan sesama warga untuk saling bertukar informasi dan pandangan politik. Antusiasme masyarakat ini mencerminkan kesadaran bahwa pemilu bukan hanya sekadar kewajiban formal untuk mencoblos, tetapi merupakan kesempatan untuk menentukan masa depan desa dan nasib mereka sendiri. Masyarakat memahami bahwa pilihan politik yang tepat akan berdampak pada kebijakan dan program pembangunan yang akan mereka nikmati atau derita selama lima tahun ke depan.

Kesadaran politik masyarakat juga terlihat dari kemampuan mereka dalam memilah dan memilih informasi politik di tengah derasnya arus informasi, termasuk hoaks dan propaganda politik. Masyarakat Desa Mopolo Esa menunjukkan literasi politik yang cukup baik, dimana mereka tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum diverifikasi kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Mereka cenderung mengecek kebenaran informasi dengan bertanya kepada tokoh masyarakat yang dipercaya, atau mencari konfirmasi dari sumber-sumber yang lebih kredibel. Sikap kritis ini penting dalam menjaga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terpolarisasi oleh kampanye hitam dan informasi bohong yang bertujuan memecah belah masyarakat. Kemampuan untuk bersikap kritis terhadap informasi ini merupakan indikator kematangan demokrasi di tingkat akar rumput, dimana masyarakat tidak lagi menjadi objek manipulasi politik tetapi menjadi subjek yang aktif dan cerdas dalam berdemokrasi.

Partisipasi aktif masyarakat juga didorong oleh rasa memiliki terhadap desa dan keyakinan bahwa suara mereka bermakna dalam menentukan arah pembangunan. Masyarakat Desa Mopolo Esa memiliki harapan besar terhadap pemilu sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat dan mampu membawa perubahan positif bagi desa. Harapan ini mendorong mereka untuk tidak apatis atau golput, tetapi justru semakin aktif dan antusias dalam menggunakan hak pilih mereka. Kesadaran bahwa demokrasi akan berjalan baik jika semua warga berpartisipasi juga tertanam kuat dalam benak masyarakat, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk mengajak keluarga dan tetangga agar ikut memberikan suara pada hari pencoblosan. Solidaritas sosial yang kuat di desa menjadi modal sosial yang penting dalam mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi, karena pemilu tidak hanya dipandang sebagai urusan individu tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif untuk kemajuan bersama. Dengan demikian, respon masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga keterlibatan mereka pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa demokrasi telah mengakar di tingkat desa dan masyarakat telah menjadi aktor aktif yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses demokrasi.

2. Pembahasan

a. Respon Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemilu

Respon masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga ketertiban dan keamanan Pemilu 2024 menunjukkan manifestasi dari partisipasi politik yang matang dan berkualitas. Menurut Huntington dan Nelson (1994), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, dimana partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, dengan cara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam konteks Desa Mopolo Esa, partisipasi masyarakat tergolong dalam bentuk partisipasi yang bersifat otonom, damai, legal, dan efektif, dimana masyarakat terlibat dalam pemilu bukan karena mobilisasi atau tekanan dari pihak tertentu, melainkan atas kesadaran sendiri akan pentingnya pemilu sebagai mekanisme demokrasi. Ketertiban yang terjaga dengan baik menunjukkan bahwa masyarakat telah melampaui tahap partisipasi yang sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi telah berkembang menjadi partisipasi yang didasari oleh pemahaman mendalam tentang esensi demokrasi dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Peran perangkat desa dalam membentuk respon positif masyarakat juga sejalan dengan teori budaya politik partisipan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963). Dalam budaya politik partisipan, masyarakat memiliki orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang tinggi terhadap sistem politik, dimana mereka tidak hanya memiliki pengetahuan tentang sistem politik dan proses demokrasi, tetapi juga memiliki ikatan emosional dan kemampuan untuk menilai kinerja sistem politik tersebut. Himbauan yang disampaikan oleh perangkat desa agar masyarakat tidak mudah terprovokasi mencerminkan upaya membangun orientasi kognitif masyarakat tentang dinamika politik yang sehat, dimana perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dan tidak boleh merusak kohesi sosial. Pesan "panas boleh tetapi pikiran harus tetap dingin" merupakan bentuk pendidikan politik informal yang efektif dalam membangun kematangan emosional masyarakat dalam berpolitik. Strategi komunikasi persuasif seperti ini lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan instruktif atau represif, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri berdasarkan pertimbangan rasional.

Keberhasilan masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menjaga ketertiban pemilu juga mencerminkan adanya civic culture atau budaya kewarganegaraan yang kuat. Almond dan Verba (1963) menjelaskan bahwa civic culture merupakan budaya politik campuran yang mengkombinasikan orientasi partisipan dengan orientasi subjek dan parokial, dimana masyarakat aktif dalam politik namun tetap menghormati otoritas dan memelihara nilai-nilai tradisional yang positif. Dalam konteks Desa Mopolo Esa, masyarakat menunjukkan orientasi partisipan yang tinggi dengan antusiasme mereka menggunakan hak pilih, namun tetap menghormati otoritas perangkat desa dan lembaga penyelenggara pemilu, serta memelihara nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kerukunan yang menjadi modal sosial dalam menjaga ketertiban. Kombinasi antara kesadaran modern tentang hak dan kewajiban politik dengan nilai-nilai tradisional yang menekankan harmoni sosial menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang damai dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat desa tidak harus mengikuti model Barat secara mentah-mentah, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks lokal dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi.

b. Sikap Masyarakat terhadap Politik Uang dan Pelanggaran Pemilu

Sikap tegas masyarakat Desa Mopolo Esa dalam menolak politik uang menunjukkan tingkat integritas pemilu yang tinggi di tingkat akar rumput. Menurut Satria (2017), politik uang atau money politics adalah pemberian atau janji menyuapakan uang atau materi lainnya yang dilakukan oleh atau atas nama peserta pemilu kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mempengaruhi pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu,

yang merupakan tindak pidana pemilu yang mengancam integritas demokrasi. Kesadaran masyarakat bahwa politik uang merusak integritas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang dampak jangka panjang dari praktik tersebut. Politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan sistem politik transaksional yang mengubah hubungan pemimpin-rakyat dari hubungan representasi dan akuntabilitas menjadi hubungan jual beli yang menempatkan rakyat sebagai komoditas politik. Penolakan masyarakat terhadap politik uang merupakan bentuk resistensi terhadap komersialisasi demokrasi dan upaya untuk menjaga agar pemilu tetap menjadi mekanisme yang legitimate dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Tindakan proaktif masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang kepada Bawaslu mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi dan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum pemilu. Menurut Delmana et al. (2020), strategi penanganan politik uang memerlukan sinergi antara penegakan hukum, pendidikan pemilih, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Kesiapan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berposisi sebagai objek pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam mengawal integritas pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep pengawasan partisipatif dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pengawasan pemilu untuk menutup celah-celah pelanggaran yang mungkin tidak terjangkau oleh pengawas formal. Kepercayaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran juga mengindikasikan bahwa mereka percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan adil dan bahwa ada perlindungan hukum bagi pelapor, sehingga mereka tidak perlu takut terhadap intimidasi atau balas dendam dari pihak-pihak yang dilaporkan.

Norma sosial yang berkembang di Desa Mopolo Esa dimana politik uang dianggap memalukan mencerminkan kuatnya modal sosial dan kontrol sosial dalam masyarakat. Menurut Putnam (1993), modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan kerja sama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam menjaga integritas pemilu. Sanksi sosial berupa kehilangan kepercayaan dan harga diri merupakan bentuk kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan sosial yang kuat, dimana reputasi dan kehormatan di mata masyarakat sangat dihargai. Mekanisme kontrol sosial ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi hukum formal, karena sanksi sosial bersifat langsung, personal, dan berdampak pada kehidupan sehari-hari individu dalam masyarakat. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam memberikan pencerahan tentang dampak negatif politik uang juga sangat penting dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan moral dan agama, mereka mampu menyentuh aspek hati nurani masyarakat sehingga penolakan terhadap politik uang bukan hanya didasarkan pada pertimbangan legal formal, tetapi juga pada keyakinan moral dan spiritual yang lebih mendalam dan bertahan lama.

c. Partisipasi Aktif dan Kesadaran Politik Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat Desa Mopolo Esa yang tidak hanya terbatas pada kehadiran di TPS tetapi juga dalam berbagai tahapan pemilu mencerminkan bentuk partisipasi politik yang komprehensif. Huntington dan Nelson (1994) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam lima bentuk, yaitu kegiatan pemilihan (*electoral activity*), *lobbying*, kegiatan organisasi, *contacting*, dan tindakan kekerasan. Dalam konteks Desa Mopolo Esa, partisipasi masyarakat terutama dalam bentuk kegiatan pemilihan yang mencakup tidak hanya pemberian suara, tetapi juga kehadiran dalam kampanye, diskusi politik, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan kampanye dialogis

menunjukkan bahwa mereka tidak ingin hanya sekadar mencoblos tanpa informasi yang memadai, tetapi ingin memahami visi misi kandidat dan mempertimbangkan dengan matang pilihan politik mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa pemilu adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang akan berdampak besar pada kehidupan mereka, sehingga memerlukan informasi yang cukup dan pertimbangan yang matang.

Kemampuan masyarakat dalam memilah dan memilih informasi politik menunjukkan tingkat literasi politik yang baik, yang merupakan salah satu indikator penting kematangan demokrasi. Menurut Almond dan Verba (1963), komponen kognitif dalam budaya politik meliputi pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik, perannya, input dan output-nya. Masyarakat Desa Mopolo Esa menunjukkan orientasi kognitif yang tinggi dengan kemampuan mereka untuk bersikap kritis terhadap informasi, tidak mudah percaya pada hoaks, dan mencari verifikasi dari sumber yang kredibel. Di era digital dimana informasi mengalir sangat deras dan hoaks politik marak beredar, kemampuan literasi digital dan politik menjadi sangat penting untuk mencegah masyarakat terpolarisasi atau termanipulasi oleh kampanye hitam. Sikap kritis masyarakat dalam menyikapi informasi mencerminkan kedewasaan politik dimana mereka tidak lagi menjadi massa yang mudah digerakkan atau dipengaruhi, tetapi menjadi warga negara yang cerdas dan rasional dalam menentukan pilihan politik mereka. Kemampuan ini juga menunjukkan efektivitas dari pendidikan politik yang telah berlangsung, baik melalui jalur formal maupun informal, yang telah meningkatkan kapasitas kognitif masyarakat dalam memahami dan menilai fenomena politik.

Rasa memiliki dan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat Desa Mopolo Esa menjadi modal sosial yang penting dalam mempertahankan partisipasi politik yang tinggi. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama, termasuk dalam konteks partisipasi politik. Kesadaran kolektif bahwa demokrasi akan berjalan baik jika semua warga berpartisipasi mencerminkan pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat tidak hanya memikirkan kepentingan individual mereka dalam memilih, tetapi juga memikirkan kepentingan kolektif dan masa depan desa. Solidaritas sosial yang kuat mendorong mereka untuk saling mengingatkan dan mengajak untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga partisipasi tidak hanya menjadi urusan individu tetapi menjadi proyek kolektif masyarakat. Ikatan sosial yang kuat di desa, yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari, kegiatan gotong royong, dan ritual-ritual sosial keagamaan, menciptakan jaringan sosial yang efektif dalam memobilisasi partisipasi politik secara organik tanpa perlu mobilisasi dari luar. Dengan demikian, tingginya partisipasi politik di Desa Mopolo Esa bukan semata-mata hasil dari kesadaran individual, tetapi juga merupakan hasil dari modal sosial dan kultur demokratis yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang respon masyarakat di Desa Mopolo Esa dalam menjaga keterlibatan pesta demokrasi pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa masyarakat desa telah mencapai tingkat kematangan politik yang tinggi. Respon masyarakat tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu kemampuan menjaga ketertiban dan keamanan pemilu dengan sikap yang tertib dan tidak terprovokasi, sikap tegas menolak politik uang dengan kesediaan melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu, dan partisipasi aktif yang tidak hanya terbatas pada pemberian suara tetapi juga dalam berbagai tahapan pemilu dengan kesadaran politik yang tinggi. Keberhasilan menjaga ketertiban pemilu tidak dapat dilepaskan dari peran perangkat desa yang menggunakan strategi komunikasi persuasif untuk membangun kesadaran masyarakat, norma sosial dan kontrol sosial yang kuat dalam menolak praktik-praktik yang merusak integritas pemilu, serta modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial yang memfasilitasi partisipasi

politik yang berkualitas. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat desa tidak sekadar menjalankan prosedur formal pemilu, tetapi telah berkembang menjadi kultur demokratis yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, dimana nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, kebebasan, kesetaraan, dan akuntabilitas telah terinternalisasi dalam kesadaran dan praktik sehari-hari masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika partisipasi politik di tingkat desa sebagai basis demokrasi di Indonesia, dimana keberhasilan pemilu nasional sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan pemilu di tingkat desa. Pengalaman Desa Mopolo Esa dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam membangun kultur demokratis yang sehat, dimana kunci keberhasilannya terletak pada kombinasi antara pendidikan politik yang kontinu, kepemimpinan lokal yang demokratis dan responsif, norma sosial yang mendukung integritas pemilu, dan modal sosial yang kuat. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembangunan demokrasi yang kontekstual, yang tidak hanya meminjam model demokrasi dari luar tetapi juga menggali dan mengoptimalkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif dengan desa-desa lain yang memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi kualitas partisipasi politik masyarakat desa, serta mengeksplorasi lebih dalam tentang mekanisme transmisi nilai-nilai demokratis antar generasi di tingkat desa untuk memastikan keberlanjutan kultur demokratis yang telah terbangun.

E. Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delmana, L. P., et al. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 1-25.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews and Focus Groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291-295.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendagri. (2021). *Data Pokok Desa dan Kelurahan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- KPU. (2024). *Laporan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Demokrasi*, 11(1), 89-103.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pagar Alam, D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(1), 45-62.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton

University Press.

- Satria, H. (2017). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 1-14.
- Wardhani, P. S. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 123-135.
- Zainal, A. (2018). Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(1), 78-94.